

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesi (PHI)*, Ed.1, Rajawali Pers, Depok.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Depok.
- Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- P.A.F Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Grafido Persada, Yogyakarta.
- Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim Suparman A.Diraputra, 2001, *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Amirullah, "Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012, Vol.2, No.2.
- Anak Agung Gede Wiweke, I Gusti Bagus Suryawan dkk, "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)", Jurnal Konstruksi Hukum, 2020, Vol.1, No.2.
- Chant S.R Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP", Jurnal Lex Crimen, 2017, Vol.V, No.6.
- Dennys William, Piatur Pangaribuan dan Rosdiana, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik Di Kota Balikpapan", Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, Jurnal Lex Suprema, 2020, Vol.2, No.1.

Febryanto Samuel Pangkey, “Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Ketenagalistrikan”, Jurnal Lex et Societatis, 2013, Vol.1, No.3.

Glays Keke Rondonuwu, “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketenagalistrikan Di PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.2017.

I Gusti Ayu Jatiana MW, A.A. Ketut Sukranatha, “Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian”, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Paryono, “Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia”, Jurnal Hukum Ransendental.

Tommy J.Bassang, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming”, Jurnal Lex Crimen, 2015, Vol.IV, No.5.

Yagie Sagita Putra, “Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana”, Jurnal Ubelaj, 2017, Vol.1, No.1.

MEDIA ONLINE

<https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/1395#:~:text=Izin%20Usaha%20Jasa%20Penunjang%20Tenaga%20Listrik%20adalah%20izin,usaha%20jasa%20penunjang%20tenaga%20listrik.&text=Laboratorium%20pe ngujian%20peralatan%20dan%20pemanfaat.kompetensi%20tenaga%20teknik%20keten agalistrikan%3B%20atau> diakses pada hari Selasa, 20 April 2021, Pukul 20.00 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
(selanjutnya disebut sebagai KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana /
KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.